

## Kekuasaan Dan Politik Dalam Perilaku Organisasi

Putri Suci Ramadhani<sup>1</sup>, Desi Fitri Yani<sup>2</sup>, Dessy Masliani Lubis<sup>3</sup>, Maidiana<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

<sup>2</sup> Manajemen Pendidikan Islam

\* email : putrisuciramadhani21@gmail.com, desisaragih103@gmail.com, dessymasliani02@gmail.com, Sihombingmaidiana19@gmail.com

### Article history

Submitted: 2023/01/01; Revised: 2023/02/02; Accepted: 2023/04/04

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan kajian literatur tentang kekuasaan dan politik dalam perilaku organisasi. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kajian literatur atau dengan berbasis kajian pustaka melalui bedah buku dan jurnal-jurnal. Langkah-langkah penelitian dimulai dari pengumpulan artikel, reduksi artikel, pembahasan dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya hubungan Kekuasaan politik merujuk pada kemampuan atau otoritas seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi dan mengendalikan kebijakan, keputusan, dan tindakan dalam konteks politik. Ini melibatkan penggunaan pengaruh, kontrol atas institusi-institusi politik, dan seringkali didasarkan pada legitimasi yang diberikan oleh masyarakat atau lembaga-lembaga formal. Dalam konteks kekuasaan politik, terdapat elemen-elemen seperti pemilihan umum, lembaga pemerintah, proses pembuatan kebijakan, dan interaksi antara penguasa dan warganegara. Otoritas politik dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk konstitusi, dukungan rakyat, atau sistem politik tertentu. Penting untuk dicatat bahwa kekuasaan politik tidak hanya terbatas pada pemerintahan formal. Kekuasaan politik juga dapat ditemukan dalam berbagai tingkatan masyarakat, termasuk kelompok politik, kelompok kepentingan, dan bentuk-bentuk organisasi sosial yang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik.

### Kata Kunci:

Politik, Kekuasaan, Organisasi



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

## PENDAHULUAN

Politik dan kekuasaan tidak hanya terjadi dalam sistem pemerintahan, tetapi juga dalam organisasi formal, organisasi ekonomi, organisasi keagamaan, kelompok, bahkan unit keluarga. Politik adalah jaringan interaksi antara orang-orang di mana kekuasaan diperoleh, ditransfer, dan digunakan. Politik dilakukan untuk menyelaraskan kepentingan individu

pegawai, kepentingan manajemen, dan kepentingan organisasi. Ketika keseimbangan ini tercapai, kepentingan individu memfasilitasi terwujudnya kepentingan organisasi. Penyalahgunaan kekuasaan yang sering dilakukan para politisi dalam dunia politik telah menimbulkan persepsi bahwa tujuan utama berpartisipasi dalam politik hanyalah untuk memperoleh kekuasaan. Faktanya, pelaksanaan kekuasaan dalam politik pada dasarnya bertujuan untuk mengoordinasikan kepentingan semua orang dalam suatu organisasi, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok mana pun.

Oleh karena itu, pembatasan kekuasaan sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan anggota organisasi terhadap penguasa dan menciptakan keadilan dan kenyamanan dalam hidup. Meskipun kekuasaan melibatkan distribusi otoritas, politik melibatkan strategi dan taktik untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan. Dalam konteks ini, menjadi penting untuk menganalisis interaksi antar anggota organisasi untuk memahami bagaimana keputusan dibuat, konflik diselesaikan, dan tujuan organisasi dicapai. Dalam konteks organisasi, kekuasaan dan politik sering kali saling terkait. Pakar manajemen Jeffrey Pfeffer menekankan bahwa kekuasaan adalah alat penting untuk mencapai tujuan organisasi, dan politik adalah cara orang menggunakan kekuasaan tersebut. Oleh karena itu, memahami hubungan kekuasaan dan politik sangat penting untuk menganalisis perilaku organisasi.

Politik dan kekuasaan adalah sesuatu yang ada dan dialami dalam kehidupan setiap organisasi, tetapi agak sulit untuk mengukurnya akan tetapi penting untuk dipelajari dalam perilaku keorganisasian, karena keberadaannya dapat mempengaruhi perilaku orang-orang yang ada dalam organisasi. Politik dan kekuasaan tidak hanya terjadi pada sistem pemerintahan, namun politik juga terjadi pada organisasi formal, badan usaha, organisasi keagamaan, kelompok, bahkan pada unit keluarga (Paramita, 2011). Politik adalah suatu jaringan interaksi antar manusia dengan kekuasaan diperoleh, ditransfer, dan digunakan (Khairani, 2020). Politik dijalankan untuk menyeimbangkan kepentingan individu karyawan dan kepentingan manajer, serta kepentingan organisasi. Ketika keseimbangan tersebut tercapai, kepentingan individu akan mendorong pencapaian kepentingan organisasi. Namun, dalam decade terakhir ini, konflik dan politik telah menjadi bukan hanya dapat diterima tetapi topik yang modis dalam teori organisasi.

Keterkaitan Kekuasaan dan Politik dalam Perilaku Organisasi: Kekuasaan digunakan sebagai dasar politik, di mana individu atau kelompok berusaha memanfaatkannya untuk mencapai tujuan pribadi atau kelompok. Politik dapat muncul dalam berbagai tingkatan organisasi, dari level operasional hingga tingkat manajerial tertinggi, memengaruhi cara keputusan diambil dan diimplementasikan. Dengan memahami dinamika kekuasaan dan politik, organisasi dapat mengelola konflik, meningkatkan kinerja, dan menciptakan lingkungan yang lebih efisien serta berdaya saing.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif/deskriptif dengan menggunakan kajian literatur atau dengan kajian pustaka yaitu dengan berisi teori-teori yang relevan dengan masalah-masalah penelitian. Adapun masalah pada penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kekuasaan dan politik dalam perilaku organisasi. Pengkajian penelitian ini menggunakan konsep dan teori yang dilakukan berdasarkan literatur yang tersedia, terlebih dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian. (Sujerweni, 2014)

Menurut Sukardi (2013), kajian pustaka atau studi pustaka merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. Adapun jenis penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan agar obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau *library research*, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, dan juga telaah yang dilakukan untuk memecahkan suatu problem yang pada umumnya tertumpu oleh penelaahan kritis serta mendalam pada bahan-bahan pustaka yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengertian Politik

Politik berasal dari Bahasa Yunani "*politeia*" yang berarti kiat memimpin kota (polis). Secara prinsip, politik merupakan upaya untuk ikut berperan serta dalam mengurus dan mengendalikan urusan masyarakat. Menurut Arsitoteles, politik adalah usaha warga negara dalam mencapai kebaikan bersama atau kepentingan umum. Politik juga dapat diartikan sebagai proses pembentukan kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.

Menurut Miriam Budiardjo(2003), ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang perpolitikan. Politik diartikan sebagai usaha-usaha untuk mencapai kehidupan yang baik. Politik sebagai suatu bagian kekuasaan diluar kekuasaan negara belaka berperan penting dalam produk hukum yang dihasilkan nantinya, produk hukum tersebutlah yang dinamakan produk politik. Makna kata politik memiliki berarti pengetahuan mengenai ketatanegaraan, atau segala urusan dan tindakan kebijaksanaan siasat dan sebagainya mengenai pemerintahan sesuatu negara atau terhadap negara lain, atau lebih jauh dapat dimaknai sebagai ilmu untuk mendapatkan kekuasaan (Partanto & Al Barry, 1994).

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, konsep politik dibatasi pada:

- a. Politik sebagai barang publik Politik adalah seperangkat prinsip, kondisi, cara, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau situasi tertentu yang kita inginkan, dan untuk mencapai keadaan tersebut, menyangkut cara, metode, dan alat yang digunakan. Itu yang kami inginkan. Politik dalam pengertian ini adalah tempat di mana semua individu dan kelompok beroperasi, dan setiap orang bertindak berdasarkan kepentingan dan gagasannya masing-masing.
- b. Politik dalam arti politik Politik dalam arti politik adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dirancang untuk menjadikan terwujudnya usaha, cita-cita, cita-cita, atau keadaan yang kita inginkan menjadi lebih pasti. Politik adalah serangkaian keputusan yang dibuat oleh aktor atau kelompok politik untuk memilih tujuan dan metode untuk mencapai tujuan tersebut.

## **B. Faktor-faktor Berperilaku Politik**

Prilaku politik dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

1. Sosial-Ekonomi: Tingkat pendidikan, status ekonomi, dan pekerjaan seseorang dapat memengaruhi pandangan politik dan partisipasi dalam proses politik.
2. Identitas Politik: Faktor seperti agama, etnis, dan identitas kultural dapat membentuk prilaku politik seseorang dan mempengaruhi preferensi politiknya.
3. Media Massa: Informasi dan persepsi politik dapat dipengaruhi oleh media massa. Media memainkan peran penting dalam membentuk opini publik dan orientasi politik.
4. Keluarga dan Lingkungan Sosial: Nilai-nilai yang diterima dari keluarga dan lingkungan sosial dapat membentuk prilaku politik seseorang.
5. Isu Politik Tertentu: Isu-isu tertentu seperti ekonomi, lingkungan, atau keamanan dapat memotivasi orang untuk terlibat secara aktif dalam politik.
6. Sistem Politik: Struktur politik dan tata kelola pemerintahan suatu negara dapat memengaruhi cara orang terlibat dalam proses politik.
7. Pengalaman Pribadi: Pengalaman langsung seseorang dengan pemerintah atau partai politik dapat memengaruhi sikap dan tindakan politiknya.
8. Perubahan Sosial: Perubahan dalam masyarakat, termasuk perkembangan teknologi dan perubahan demografis, dapat membentuk prilaku politik.
9. Globalisasi: Pengaruh dari peristiwa dan tren global juga dapat memainkan peran dalam membentuk pandangan politik individu.

Faktor-faktor ini saling berinteraksi dan kompleks, menciptakan kerangka kerja yang membentuk prilaku politik seseorang. Karl Albrecht (1983) memberikan pemahaman bahwa suatu organisasi akan dipengaruhi faktor-faktor politis internal yang berkaitan dengan budaya organisasi dan gaya manajemen. Faktor-faktor politis yang dimaksud Albrecht merupakan iklim politik organisasi yang pada prinsipnya juga mempengaruhi iklim

organisasi secara keseluruhan. Elemen Politik internal organisasi yaitu faktor-faktor internal dalam organisasi, kultur, dan gaya manajemen, yang mempengaruhi para pengambil keputusan dalam melaksanakan fungsi manajemennya. Kreitner (2006) menjelaskan faktor-faktor utama yang menyebabkan munculnya perilaku berpolitik adalah karena adanya ketidakpastian dalam organisasi, seperti tujuan tidak jelas, ukuran prestasi dan kinerja tidak terstandar, proses pembuatan keputusan tidak terdefinisi dengan baik, kompetisi antar individu dan kelompok tinggi, dan perubahan

### C. Elemen Politik Dalam Organisasi

Elemen politik dalam organisasi dapat dijelaskan melalui perspektif beberapa ahli. Menurut para ahli, politik organisasi mencakup interaksi dan dinamika kekuasaan di dalam suatu struktur organisasi.

- a. Michael N. Dobbs: Dobbs mengatakan bahwa politik organisasi melibatkan persaingan antarindividu atau kelompok untuk mendapatkan sumber daya dan pengaruh di dalam organisasi.
- b. David Easton: Easton mengartikan politik organisasi sebagai proses penentuan kebijakan di mana berbagai kelompok atau individu berusaha memengaruhi kebijakan organisasi sesuai dengan kepentingan mereka.
- c. Gareth Morgan: Morgan menggambarkan politik organisasi sebagai aktivitas manusia yang terkait dengan penggunaan kekuasaan dan pengaruh untuk mencapai tujuan organisasi.
- d. Jeffrey Pfeffer: Pfeffer menyoroti bahwa politik organisasi adalah realitas yang tidak dapat dihindari dan bahkan dapat dilihat sebagai cara yang efektif untuk mencapai kesuksesan dalam organisasi.

Jadi, elemen politik dalam organisasi mencakup persaingan kekuasaan, pengaruh, dan dinamika antarindividu atau kelompok untuk mencapai tujuan dan memperoleh sumber daya. Albrecht (1983) mengungkapkan ada lima elemen iklim politis dalam organisasi yang hendaknya dapat dipahami manajer senior dalam mengendalikan organisasi, antara lain :

1. Inner Circle Relationship  
Mengidentifikasi hubungan antara Manager Upper dengan Chief Executive, apakah hubungan tersebut bersifat kekeluargaan, kerabat atau pertemanan (Friendlines). Disamping itu apakah terjadi kolaborasi antar manajer dan apa ada grup khusus baik dari dalam departemen maupun dari luar departemen yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
2. Axis of Influence

Mengidentifikasi hubungan pertemanan dari manager menengah / area yang memiliki hubungan langsung ke Chief Executive tanpa melewati Manajer Divisinya. Apakah ada hubungan khusus antara berbagai manager level menengah dengan pimpinan puncak sehingga dapat mengesampingkan peran manager divisinya. Bisa jadi hubungan tersebut timbul karena memang adanya special expertise (keahlian khusus) yang dimilikinya dalam pengelolaan unit yang dipimpinnya sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas tanpa diperlukan manager divisi.

3. Informal Power Centers

Apakah ada karyawan level operasional yang memiliki hubungan khusus / pertemanan dengan manager senior, sehingga melewati atasannya.

4. Polarizing Elements

Adakah ketidakcocokan antara Manajer dengan bawahannya dan dalam hal apa sajakah itu terjadi, dalam semua aktivitas organisasi atau hanya perbedaan yang tidak prinsip saja. Timbulnya hubungan antar personal yang saling berkompetisi sehingga mempengaruhi interaksi emosional bila akan mempengaruhi pengambilan keputusan maka akan menjadi kendala pelaksanaan tugas-tugas saja.

5. Informal Coalitions

Apakah ada grup manager yang berkoalisi untuk menolak keputusan atau mengambil keputusan yang lain dengan yang sudah ditetapkan manager atasnya dan sejauh mana hal ini akan diteruskan.

#### **D. Pengertian Kekuasaan**

Kekuasaan memiliki berbagai definisi menurut ahli. Secara umum, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan atau otoritas untuk mempengaruhi atau mengendalikan perilaku orang atau kelompok lain. Menurut Max Weber, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi orang lain, meskipun orang tersebut tidak setuju. Weber mengklasifikasikan kekuasaan menjadi tiga tipe utama: tradisional, rasional-legal, dan karismatik. Michel Foucault melihat kekuasaan sebagai suatu hal yang terdistribusi di seluruh struktur sosial dan bukan hanya dimonopoli oleh pemerintahan atau lembaga formal. Baginya, kekuasaan hadir dalam segala hubungan sosial dan dapat mengatur pengetahuan, norma, dan nilai.

Bertrand Russell menggambarkan kekuasaan sebagai kemampuan untuk menciptakan perubahan atau mencegah perubahan, baik melalui pengaruh langsung atau dengan mengendalikan sumber daya yang diperlukan. Hannah Arendt membedakan antara kekuasaan (power) dan penguasaan (rule). Baginya, kekuasaan muncul ketika orang-orang bersatu untuk mencapai tujuan bersama, sedangkan penguasaan berkaitan dengan kontrol yang bersifat otoriter. Greenberg dan Baron (2000) menyatakan bahwa "A memiliki kekuasaan atas B sehingga A dapat meminta B melakukan sesuatu yang tanpa kekuasaan A tersebut tidak akan dilakukan B". Definisi ini menyempitkan konsep kekuasaan, juga

menuntut seseorang untuk mengenali jenis-jenis perilaku khusus. Riker (1964) berpendapat bahwa perbedaan dalam kekuasaan benar-benar didasarkan pada perbedaan kausalitas (sebab-akibat). Kekuasaan adalah kemampuan untuk menggunakan pengaruh, sedangkan alasan adalah penggunaan pengaruh yang sebenarnya. Sedangkan Russel (1983) menyatakan bahwa power (kekuasaan) adalah konsep dasar dalam ilmu sosial. Kekuasaan penting dalam kehidupan organisasi, dan bahwa kekuasaan dalam organisasi terikat dengan status seseorang. Boulding (1989) mengemukakan gagasan kekuasaan dalam arti luas, sampai tingkat mana dan bagaimana kita memperoleh yang kita inginkan. Bila hal ini diterapkan pada lingkungan organisasi, ini adalah masalah penentuan di seputar bagaimana organisasi memperoleh apa yang diinginkan dan bagaimana para pemberi andil dalam organisasi itu memperoleh apa yang mereka inginkan. Kita memandang kekuasaan sebagai kemampuan perorangan atau kelompok untuk mempengaruhi, memberi perintah dan mengendalikan hasilhasil organisasi. Setiap ahli memiliki perspektif unik terhadap konsep kekuasaan, mencerminkan kompleksitasnya dalam konteks sosial, politik, dan budaya.

#### **E. Unsur-Unsur Kekuasaan**

Unsur-unsur kekuasaan dapat dibagi menjadi beberapa aspek. Berikut adalah beberapa unsur umum kekuasaan:

- a. Otoritas: Otoritas merupakan legitimasi atau hak yang diberikan kepada seseorang atau kelompok untuk memerintah atau memimpin. Ini dapat berasal dari norma sosial, hukum, atau pengakuan masyarakat.
- b. Kontrol Sumber Daya: Kekuasaan seringkali terkait dengan kontrol atas sumber daya, baik itu ekonomi, politik, atau informasi. Siapa yang mengendalikan sumber daya memiliki keunggulan dalam mempengaruhi orang lain.
- c. Pengaruh: Kekuasaan melibatkan kemampuan untuk mempengaruhi pikiran, tindakan, atau keputusan orang lain. Ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk komunikasi, persuasi, atau bahkan paksaan.
- d. Legitimasi: Legitimasi merupakan dasar moral atau hukum dari kekuasaan. Adanya pembenaran yang diterima oleh masyarakat dapat memperkuat kekuatan penguasa.
- e. Ketergantungan: Kekuasaan dapat tumbuh dari ketergantungan. Orang atau kelompok yang mengendalikan sesuatu yang sangat diinginkan atau diperlukan oleh orang lain memiliki kekuatan untuk memengaruhi perilaku mereka.
- f. Kontrol Informasi: Pengendalian informasi memberikan kekuatan untuk membentuk persepsi dan pengetahuan. Manipulasi atau kontrol terhadap aliran informasi dapat digunakan untuk memperkuat kekuasaan.
- g. Ketidakpastian: Kekuasaan dapat tumbuh dalam konteks ketidakpastian. Orang yang mampu mengelola atau memanfaatkan ketidakpastian memiliki keunggulan dalam situasi tertentu.

- h. Ketidaksetaraan: Adanya ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya, hak, atau keuntungan dapat menjadi landasan untuk kekuasaan. Kekuasaan seringkali muncul dalam hubungan yang tidak seimbang.

Semua unsur ini saling terkait dan dapat berinteraksi dalam dinamika kompleks kekuasaan dalam berbagai konteks sosial, politik, dan ekonomi. Kekuasaan terdiri dari tiga unsur, yaitu tujuan, cara, dan hasil. Kekuasaan dapat digunakan untuk tujuan yang baik dan yang tidak baik. Tujuan dari penggunaan kekuasaan biasanya akan mempengaruhi cara yang dipilih oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan. Jika pemegang kekuasaan memiliki tujuan yang baik, maka cara yang dipilih juga akan baik. Dan sebaliknya, jika pemegang kekuasaan menghendaki tujuan yang tidak baik, maka cara yang digunakan juga tidak baik, misalnya dengan mengancam. Kemudian, unsur yang terakhir atau hasil dari kekuasaan dapat dilihat dari jumlah individu yang dapat dikendalikan atau dipengaruhi, dan seberapa besar pengaruh kekuasaan tersebut. Sikap pihak yang dikuasai, turut menentukan kualitas kekuasaan yang berlaku atas dirinya. Jika diterima dan didukung, maka kekuasaan itu merupakan wibawa. Kekuasaan yang demikian tidak banyak memerlukan paksaan (kekuatan) dalam penggunaannya.

## **KESIMPULAN**

Kekuasaan dan politik dalam perilaku organisasi adalah bahwa keduanya merupakan elemen yang tidak terpisahkan dalam dinamika organisasi. Kekuasaan seringkali menjadi sumber konflik, tetapi juga dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan. Politik, sebagai proses pengambilan keputusan, dapat memengaruhi distribusi kekuasaan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang interaksi antara kekuasaan dan politik penting untuk efektivitas dan keseimbangan dalam organisasi. Dalam konteks perilaku organisasi, kekuasaan dan politik memainkan peran penting. Kekuasaan dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti kekuasaan formal yang terkait dengan posisi hierarki dan kekuasaan informal yang berkaitan dengan pengaruh interpersonal. Politik organisasi melibatkan upaya individu atau kelompok untuk memanfaatkan kekuasaan mereka guna mencapai tujuan pribadi atau kelompok.

Dalam beberapa kasus, politik dapat menjadi cara untuk memfasilitasi perubahan positif atau untuk mengatasi hambatan dalam organisasi. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, politik juga dapat menciptakan ketidaksetaraan dan konflik di antara anggota organisasi. Penting untuk organisasi memiliki struktur dan budaya yang mendukung distribusi kekuasaan yang adil dan transparan serta mengurangi praktik politik yang merugikan. Efektivitas organisasi seringkali tergantung pada sejauh mana kekuasaan dan politik dikelola untuk mendukung tujuan bersama dan kesejahteraan seluruh anggota organisasi.



## REFERENCES

- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia pustaka utama
- Khairani, L. (2020). [BUKU] *Sejarah Politik dan Kekuasaan. Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen*
- Nuraini, (2018). Pengaruh Kekuasaan dan Politik Terhadap Pembentukan Hukum Di Indonesia, *Hukum Mimbar Pendidikan Hukum Nasional* 2 (2), 92-104.
- Rofik Aksan, (2022). Kekuasaan dan Politik Lembaga pendidikan Islam, *Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah* 10 (1), 17-27.
- Paramita, P. D. (2011). Keterkaitan antara politik dan kekuasaan dalam organisas. *Dinamika Sains*, 9(21).
- Sujerweni, V. W. (2014). *Metodeologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sukardi. (2013). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* . Jakarta: PT Bumi Aksara .
- Wafiq Salsabilah, Rizca Yunike Putri, (2022) *Kekuasaan Dalam Ranah Kajian Politik dan Organisasi, Jurnal ilmu Sosial dan Politik* 2(1)